

WANITA INDONESIA DAN PENDIDIKANNYA

Murwatie B. RAHARDJO *

PENDAHULUAN

Dalam masa pembangunan sekarang ini, dunia pendidikan sendiri di Indonesia cukup banyak permasalahannya. Sebagai contoh yang paling penting adalah seperti tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah, kesempatan memperoleh pendidikan yang belum merata bagi seluruh penduduk usia sekolah, sistem pendidikan yang sedang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia untuk semua generasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan cita-cita kemajuan pendidikan.

Satu hal lagi yang cukup penting adalah masalah wanita sehubungan dengan pendidikannya. Emansipasi wanita yang menginginkan persamaan hak dan kesempatan, terutama dalam hal memperoleh pendidikan, menjadi kenyataan di Indonesia. Semenjak dipelopori oleh tokoh emansipasi wanita R.A. Kartini yang menjadi tonggak sejarah pergerakan wanita di Indonesia, hal ini juga dinyatakan dalam landasan konstitusional negara kita (UUD 1945 pasal 31 ayat 1).

Namun dalam kenyataannya, wanita yang berpendidikan di segala tingkatan tetap mempunyai masalah yang sangat khas, yaitu berupa suatu dilema yang dihadapi oleh wanita hampir di seluruh dunia. Sehubungan dengan itu kiranya masih ada hal-hal yang harus dihadapi lebih dahulu oleh wanita sebelum memutuskan apakah wanita itu hanya akan berperanan secara biologis kodratnya atautkah juga menempuh suatu karier sesudah menempuh pendidikan yang diinginkannya. Bagaimanapun keputusan yang diambil seseorang wanita dapat dipastikan akan menimbulkan pengaruh terhadap sekelilingnya. Kemudian masalahnya adalah bagaimana pengaruh tersebut diusahakan agar bersifat membangun baik bagi wanita itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

* Staf CSIS

Di Indonesia masalah ini memperoleh tempat yang cukup strategis dalam pembangunan. Hal ini karena menyangkut lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia (50,8%) terdiri dari wanita. Segi-segi yang penting sehubungan dengan pendidikan wanita Indonesia hendak diketengahkan dalam tulisan ini.

GAMBARAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN WANITA INDONESIA

Di dalam masyarakat yang masih tradisional terdapat norma adat istiadat yang kuat yang membatasi peranan dan kesempatan bagi wanita. Hal ini menambah jelasnya pandangan umum terhadap wanita. Wanita sering dikatakan sebagai makhluk lemah, sebenarnya hanya dalam hal kekuatan fisiknya saja. Akan tetapi dalam perkembangan jaman telah ditunjukkan bahwa di dalam fisik yang lemah itu kadang-kadang banyak dijumpai kekuatan yang melebihi kaum laki-laki pada umumnya. Faktor pendidikan wanita ternyata dapat mengubah pandangan umum terhadap wanita tersebut.

Di Indonesia, semenjak sistem ko-edukasi ("dididik bersama") dan ko-instruksi ("belajar bersama") mulai diperkenalkan, maka anak-anak laki-laki dan perempuan mulai diberi kesempatan menempuh pendidikan dan pengajaran bersama-sama. Pada mulanya memang ada yang tidak setuju adanya ko-edukasi, karena ada anggapan bahwa adalah kurang baik akan hal berkumpulnya gadis dengan laki-laki. Sebenarnya ini tidaklah bertentangan dengan kodrat maupun adat istiadat pada umumnya; dapat dijumpai atau dilihat dalam kehidupan keluarga. Meskipun dari satu keluarga pada umumnya terlihat bahwa sebelum anak mengalami masa remaja (puberteitsperiode) maka anak laki-laki dan perempuan mendapat pengajaran dan pendidikan bersama. Mereka bermain, belajar bersama di dalam rumah tempat tinggal mereka. Apabila masa pubertas datang, maka hanya diwaktu malam saja anak laki-laki dan perempuan dipisahkan, tetapi dalam sehari-harinya mereka tetap dapat bergaul seperti biasanya.¹

Menurut sensus penduduk tahun 1971 di Indonesia sejumlah 60.135.000 orang adalah terdiri dari wanita (50,8%), dan sejumlah 59.008.000 orang laki-laki. Pada umumnya pendidikan wanita di Indonesia untuk semua golongan umur dari tingkat membaca dan menulis terus menerus mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari sensus tahun 1961 dan tahun 1971 baik di daerah kota maupun daerah pedesaan. Untuk daerah kota pada tahun 1961 tingkat kepandaian membaca dan menulis sebesar 53,3% sampai pada tahun 1971 sebesar 70%; sedang daerah pedesaan walaupun lebih rendah daripada di

1 Diambil dari "Ko-edukasi dan Ko-instruksi atau Mendidik dan Mengajar Anak Perempuan dan Laki-laki Bersama", *Wasita*, Jilid I No. 3, Desember 1928

daerah kota namun tingkat kepandaian tersebut tampak meningkat dari tahun 1961 sebesar 30,6% sampai tahun 1971 menjadi 46,1%.

Akan tetapi untuk menilai pendidikan wanita dengan hanya memakai standar bisa membaca dan menulis tidak akan bermanfaat sebab apabila dengan kepandaian itu tidak dicapai arti dan tujuan dari pendidikan itu sendiri secara keseluruhan tidak akan banyak gunanya. Misalnya dalam hal mengatasi masalah buta huruf. Walaupun sasaran pemberantasan buta huruf telah tercapai sehingga suatu wilayah dapat dinyatakan bebas buta huruf, akan tetapi apabila tidak disertai tindakan-tindakan yang memungkinkan terjadinya perubahan kehidupan penduduk pada umumnya, khususnya perubahan bagi wanita dari pandangan yang menyempitkan peranan wanita, maka kepandaian yang telah pernah dicapai menjadi tidak ada artinya. Misalnya wanita yang lulus dari pelajaran membaca dan menulis, karena kemudian tidak pernah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya maka kemungkinan besar akan menjadi buta huruf lagi. Tentu saja hal-hal semacam ini juga berlaku bagi semua macam pendidikan yang dalam penerapannya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dahulu pernah ditekuni.

Masalah wanita di Indonesia ini justru karena terdapat penilaian bahwa tingkat pendidikan sebagian besar wanita Indonesia masih rendah. Hal ini terbukti dari kurang dapat berfungsinya peranan wanita dalam pembinaan keluarga dan lebih luas lagi peranannya dalam memenuhi tuntutan pembangunan, terutama di daerah pedesaan dapat terlihat dengan jelas. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan mengakibatkan ketidakmampuan ibu rumah tangga menerapkan pemeliharaan kesehatan yang tepat, penyajian makanan cukup bergizi, terutama kepada anak pada usia di bawah lima tahun (Balita) di mana anak pada usia tersebut berada dalam masa pertumbuhan kemampuan berpikir yang sangat menentukan bagi masa depannya.

Tabel 1 menunjukkan bahwa wanita berumur di atas 10 tahun yang tidak sekolah atau masih rendah pendidikannya (belum tamat SD) masih mengambil porsi yang besar dari seluruh jumlah wanita baik pada tahun 1961 (90%) maupun pada tahun 1971 (80%). Dari jumlah itu di antaranya 75% adalah wanita yang tidak dapat membaca dan menulis pada tahun 1961, kemudian jumlah maupun persentasenya menurun pada tahun 1971 menjadi 51%. Sedangkan jumlah penduduk yang pernah menempuh pendidikan di segala tingkatan rata-rata mengalami kenaikan.

Sedangkan pendidikan khusus untuk wanita juga telah diadakan sejak lama. Hanya pada permulaannya sekolah tersebut masih terbatas untuk wanita Eropa di Indonesia sebagai realisasi gerakan emansipasi wanita di

Tabel 1

PENDUDUK INDONESIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKANNYA, TAHUN 1961 DAN 1971

Tingkat Pendidikan	1961		1971	
	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan
Tidak sekolah	16.786.126	24.695.684	11.478.717	21.037.275
Belum tamat SD	7.911.933	4.666.397	14.740.393	12.031.585
Sekolah Dasar	5.271.254	2.649.404	9.401.970	6.372.031
SLP Umum	684.236	327.638	1.614.973	974.354
SLP Kejuruan	368.698	149.432	626.373	312.903
SLA Umum	171.325	58.635	643.658	269.028
SLA Kejuruan	113.120	43.844	489.513	242.965
Akademi	25.180	9.400	111.868	30.453
Universitas	16.499	4.758	99.797	29.270
Jumlah	31.348.371	32.605.192	39.207.262	41.299.814

Sumber: Biro Pusat Statistik

Eropa.¹ Pada tahun 1876 mulai didirikan sekolah rendah Eropa untuk wanita yang pertama di Betawi. Sesudah itu sekolah menengah untuk wanita juga didirikan. Kemudian pengaruh gagasan R.A. Kartini, Pemerintah (Hindia-Belanda) mulai memberikan perhatian kepada pendidikan kejuruan kewanita-an. Pada tahun 1918 didirikan Sekolah Kepandaian Puteri, yang juga memakai nama Huishoud School (Sekolah Rumah Tangga). Pendidikan ini setingkat Sekolah Lanjutan Pertama sekarang. Lama pendidikan 3 tahun dan menerima lulusan HIS (Hollandsch Inlandsches School), HCS (Hollandsch Chineesches School) dan Schakel School (setingkat Sekolah Dasar sekarang). Sesudah itu hingga sekarang juga didirikan pendidikan sejenis dari tingkat SLP sampai tingkat pendidikan tinggi, di mana kemudian proses pembangunan mulai menyentuh bidang pendidikan ini.

PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP ALOKASI WAKTU WANITA

Seperti diketahui sebagian besar masyarakat pedesaan bermata-pencaharian sebagai petani. Pada waktu kemajuan teknologi belum seperti

1 Dari buku *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1979

sekarang ini, pekerjaan bertani dilakukan secara tradisional di mana banyak diperlukan pemakaian tenaga kerja manusia dan banyak di antaranya terdiri dari wanita. Di sini motif ikut sertanya wanita dalam pekerjaan ini adalah membantu (suami) mencari nafkah, karena pada umumnya pendapatan sebagai petani rendah. Pendidikan tenaga kerja ini masih rendah, kebanyakan yang tertinggi berpendidikan sampai Sekolah Dasar (Tabel 2). Sebagian waktu-waktunya dihabiskan untuk membantu suaminya mencari nafkah dan mengurus anak-anaknya. Selain itu wanita pedesaan dapat pula memproduksi barang-barang kerajinan untuk menambah penghasilan rumah tangga yang dapat dikerjakan di rumahnya. Dengan demikian urusan rumah tangga dapat juga dikerjakan.

Dalam masyarakat modern, wanita berpendidikan lebih menarik lagi untuk diamati dalam hal melewatkan waktu-waktunya. Wanita yang berpendidikan tinggi harus memikirkan faktor-faktor yang menyangkut pilihan yang akan diambilnya setelah wanita tersebut menyelesaikan pendidikannya. Pilihan yang ada adalah: (1) apakah dia akan segera terjun ke pasaran kerja; (2) ataukah hanya akan menjadi wanita rumah tangga; (3) atau bila memungkinkan kedua-duanya akan ditempuh. Sedangkan pengaruh pendidikan terhadap keputusan-keputusan tersebut tergantung dari situasi pada waktu wanita tersebut mengakhiri pendidikannya. Adanya kesempatan kerja, siap atau tidaknya untuk terjun sebagai wanita rumah tangga, adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi sikap wanita-wanita tersebut.

Dalam hubungannya dengan persamaan hak dan kesempatan, negara kita telah memberi jaminan hukum. Ini berarti wanita Indonesia telah diberi hak dan kesempatan ikut serta menentukan masa depan bangsanya. Walaupun demikian, hak dan kesempatan yang telah diperoleh seperti yang diperjuangkan wanita selama ini masih menghadapi tantangan-tantangan akibat perubahan sikap wanita pekerja. Yang perlu diperhatikan adalah sampai seberapa jauh wanita/ibu yang bekerja tetap memperhatikan kehidupan rumah tangganya seperti merawat anak, suami dan sebagainya yang sampai sejauh ini tetap dituntut oleh para suami pada umumnya. Adapun tugas wanita yang mempunyai anak terhadap anaknya (khususnya bagi yang anaknya masih kecil) kiranya cukup melelahkan. Dari memandikan - memakaikan baju - makan - menidurkan - membantu anak dalam pelajaran sekolahnya - jalan-jalan - kalau sakit mesti dirawat/dibawa berobat - persiapan untuk menyongsong kelahiran bayinya dan makanan khusus untuk bayinya dan juga apabila bayi tersebut sakit. Tugas ini di luar misalnya membacakan dan bermain-main dengan anak-anak, membantu mereka dalam aktivitas lainnya yang mereka kerjakan dan lain-lain perhatian yang dituntut anak-anaknya. Dalam kenyataan tugas-tugas wanita terhadap anak-anaknya ini, faktor pendidikan ibunya sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak-

Tabel 2

WANITA YANG BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN UTAMA DAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN, 1976 (%)								
Jenis Pekerjaan	Tak sekolah	Belum tamat SD	SD	SLP	SLA	Akademi	Universitas	Jumlah
1. Profesional, Ahli teknik dan sejenis	0,2	0,16	0,7	19,0	56,7	48,03	64,2	348.866
2. Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	0,01	0,03	0,02	0,1	0,2	1,0	3,6	4.273
3. Administrasi, Ta-ta Usaha	0,02	0,07	0,6	10,1	19,8	33,3	23,0	143.746
4. Penjualan	19,0	17,7	22,5	29,4	10,0	4,7	3,4	3.122.655
5. Jasa-jasa	5,1	5,5	5,0	4,5	2,7	3,3	3	837.991
6. Petani	63,7	62,1	55,95	19,1	2,9	4,9	1,7	9.685.310
7. Produksi dan se-jenis, Operator Alat-alat Pengangkutan	11,8	14,3	15,1	17,4	7,0	2,0	1,1	2.539.802
8. Tenaga yang tak dapat digol. jabatan	0,08	0,05	0,1	0,07	0,3	1,7	-	
9. Anggota ABRI	0	0	0,01	0,25	0,3	1,1	-	13.662
Jumlah	100 (7.591.437)	100 (5.382.118)	100 (2.534.125)	100 (380.910)	100 (373.562)	100 (26.233)	100 (10.370)	2.452 1.629.875

Sumber: BPS, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, 1976*

anaknya.¹ Hal yang penting lagi adalah bahwa isteri-isteri yang berpendidikan tinggi dan bekerja, dalam menghadapi tugas-tugasnya baik di rumah maupun di tempat kerjanya tidaklah menambah waktunya oleh karena sebagian tugas merawat anak dan rumah tangganya dapat dikerjakan oleh orang lain, misalnya oleh pembantu rumah tangga.

Suatu penelitian di Amerika Serikat menyatakan bahwa waktu yang dikeluarkan oleh wanita-wanita yang diteliti untuk merawat anak berkembang menurut pendidikannya. Tabel 3 memperlihatkan bahwa wanita berpendidikan Universitas/Perguruan Tinggi (16 tahun pendidikan) lebih mencurahkan perhatiannya kepada anak-anaknya 2 kali daripada yang berpendidikan selama 12 tahun pendidikan; 83% lebih daripada wanita dengan pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Atas; dan 59% lebihnya waktu daripada wanita dengan pendidikan hanya selama 1 - 3 tahun di Perguruan Tinggi.

Tabel 3

Jenis kegiatan Rumah Tangga	Jumlah tahun pendidikan ibu/isteri			
	< 12	12	13 - 15	16
Mempersiapkan makanan	10,4	9,0	9,0	9,4
Mencuci pakaian	4,3	4,3	3,5	4,0
Merawat anak (phisik)	4,8	5,3	6,1	9,7
Lain-lain	49,70	48,10	46,9	54,3

Sumber: Manning (1968), dalam *Education, Income and Human Behavior*, oleh F. Thomas Juster, Mc Graw - Hill Book Company, New York, 1974, hal. 191

Dapat dikatakan bahwa bagi wanita berpendidikan dan berkarier waktu yang dikeluarkan untuk tugas-tugas rumah tangga cenderung berkurang. Sehingga waktu bagi mereka adalah sangat berharga.

PENDIDIKAN WANITA DAN PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Konsep lama yang mengatakan bahwa tugas pokok seorang wanita adalah mengurus rumah tangga, sekarang mengalami perubahan. Seiring dengan

1 F. Thomas Juster, *Education, Income and Human Behavior*, Mc Graw - Hill Book Company, New York, 1974, hal. 190

makin terbukanya kesempatan bagi wanita untuk menuntut pendidikan setinggi-tingginya, maka makin terbuka pula kesempatan bagi wanita untuk terjun dalam lapangan kerja. Namun wanita sebagai bagian dari angkatan kerja dapat dibedakan angkatan kerja yang belum menikah dan angkatan kerja yang menikah. Pada umumnya wanita pekerja yang tidak/belum menikah dalam melakukan tugas-tugasnya tidaklah banyak menemui masalah seperti halnya wanita pekerja yang menikah. Masalah yang dihadapi wanita pekerja yang menikah umumnya berupa sebuah dilema yang sulit untuk diatasi oleh wanita itu sendiri, terutama di daerah kota pada semua tingkatan pendidikan dan ketrampilan.

Dilema yang terdapat pada wanita pekerja yang menikah berasal baik dari lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan maupun dari dalam dirinya sendiri.¹ Pada hakekatnya masalah yang utama adalah mengenai pengurusan anak-anaknya. Di tempat kerjanya konsentrasi pikiran dapat terganggu apabila di rumah anaknya ada yang sedang sakit. Hal semacam ini dapat mengakibatkan produktivitas menurun. Oleh karena sifat pekerjaannya di luar rumah, maka berarti dia meninggalkan keluarganya (anak-anaknya). Ini memerlukan peranan dan pengertian dari pihak suami dalam ikut sertanya penanganan urusan rumah tangga termasuk urusan anak. Namun masalah ini dapat diatasi dengan adanya pembantu rumah tangga atau keluarga lain yang dapat menggantikan sebagian tugas-tugas seorang ibu. Masalah yang kiranya paling penting dirasakan seorang wanita pekerja yang menikah adalah yang berasal dari dalam dirinya. Adanya perasaan bersalah (*maternal guilt*) karena harus meninggalkan anak-anaknya maupun sebaliknya, maka sering perasaan yang demikian mendalam mengakibatkan tekanan psikologis bagi seorang ibu. Akibatnya antara lain seorang wanita pekerja yang menikah (dan mempunyai anak) selalu berada di dalam keragu-raguan.

Walaupun masalah-masalah di atas selalu menyertai wanita-wanita yang bekerja, akan tetapi perubahan konsep tentang wanita ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah wanita yang terjun sebagai angkatan kerja yang semakin meningkat sebagai akibat peningkatan pendidikan mereka.

Di Indonesia dari data Sakernas 1976 disebutkan bahwa jumlah wanita yang termasuk angkatan kerja adalah sebesar 38,8% dari seluruh jumlah wanita (Tabel 4). Wanita yang termasuk angkatan kerja meliputi 20,1% wanita yang belum menikah; 57,3% wanita menikah; dan 22,6% wanita sebagai janda. Sedangkan wanita yang bukan angkatan kerja meliputi wanita-wanita

1 Onny S. Prijono, "Suatu Dilemma untuk Ibu-ibu yang Bekerja", dalam *Analisa* No. 5 Tahun 1978, CSIS, Jakarta

Tabel 4

JUMLAH WANITA DI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN PADA TAHUN 1976

Pendidikan yang ditamatkan	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja
Tidak Sekolah	7.623.619	8.752.819
Belum Tamat Sekolah Dasar	5.434.638	11.367.742
Sekolah Dasar	2.616.490	6.260.831
Sekolah Lanjutan Pertama	419.106	1.564.196
Sekolah Lanjutan Atas	428.041	494.062
Akademi	29.104	26.566
Perguruan Tinggi	10.932	5.575
Jumlah	16.561.930 (38,8%)	28.471.791 (61,2%)

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Sakernas 1976*

yang mempunyai kegiatan-kegiatan 19,5% dalam pendidikan di sekolah; 71,5% mengurus rumah tangga; dan lain-lain seperti pensiun sebesar 9%. Dari seluruh jumlah wanita yang menikah, yaitu sebanyak 29.822.174 orang, di antaranya 31,8% termasuk angkatan kerja. Angka ini memang masih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan.

Sebenarnya dalam masa pembangunan ini partisipasi wanita terhadap angkatan kerja tidak harus memerlukan waktu di luar rumah. Dengan pendidikan yang dimiliki wanita dapat berbuat secara produktif di dalam rumah. Data mengenai hal ini menyebutkan jumlah wanita yang bekerja di dalam lingkungan rumahnya lebih kecil daripada yang bekerja di luar rumah (Tabel 5).

Dalam mengatasi masalah kesempatan kerja bagi penganggur di Indonesia antara lain telah dikembangkan konsep tentang kewiraswastaan. Hal ini dilakukan oleh karena pemerintah belum dapat memenuhi pengadaan kesempatan kerja bagi para penganggur. Sehubungan dengan partisipasi wanita dalam angkatan kerja, kiranya konsep kewiraswastaan ini tepat digunakan. Dengan demikian peningkatan jumlah wanita yang bekerja di dalam lingkungan rumahnya dapat dilakukan. Jenis kegiatan industri rumah (home industry) adalah yang paling tepat bagi wanita yang ingin berpartisipasi dalam bidang kegiatan yang produktif, akan tetapi masalah pengurusan rumah tangga dan anak-anakpun dapat diatasi. Bimbingan dan pendidikan yang

Tabel 5

JUMLAH WANITA YANG BEKERJA DI DALAM RUMAH TANGGA DAN DI LUAR RUMAH TANGGA MENURUT DAERAH

Daerah	Jumlah wanita pekerja	
	Dalam rumah tangga	Di luar rumah tangga
Kota	653.723	1.384.696
Desa	2.476.877	11.783.459
Kota + Desa	3.130.600	13.168.155

Sumber: BPS, *Sakernas 1976*

mengarah kepada maksud tersebut sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan adanya program dalam pendidikan baik formal (umum dan kejuruan) maupun nonformal, di mana diberikan cara-cara untuk mengatasi dilema yang ada pada wanita yang bekerja.

Selain dari masalah-masalah tersebut di atas, wanita berpendidikan sebagai bagian dari angkatan kerja memungkinkan peningkatan pendapatan rumah tangga. Ditinjau secara ekonomi, efek positif wanita berpendidikan dapat diketahui dari pengaruh pendidikan yang telah ditempuh dengan pendapatannya. Lebih jauh dapat dilihat biaya selama wanita tersebut menempuh pendidikan dan pendapatan setelah terjun di lapangan kerja. Apabila ditinjau dari segi ini, maka akan dijumpai keadaan yang tidak menguntungkan pada sementara wanita, di mana biaya yang tinggi selama menempuh pendidikan, sebagai input, pada akhirnya tidak memperoleh hasil (output) sebagaimana mestinya. Keadaan semacam ini terutama terdapat pada wanita yang setelah mengakhiri pendidikan tinggi, kemudian menikah misalnya dan oleh suaminya tidak diperbolehkan bekerja. Hal ini tidak berarti pendidikan tinggi yang dimiliki merupakan jaminan satu-satunya bagi kehidupan wanita tersebut, biarpun telah diakui bahwa faktor pendidikan mempunyai efek positif terhadap pendapatan seseorang. Di sini ada lagi faktor lain yang mempengaruhi kehidupan wanita tersebut yaitu kesejahteraan rumah tangganya. Apabila kesejahteraan rumah tangga dirasakan lebih penting oleh wanita tersebut pada umumnya wanita rela melepas keinginan-keinginan untuk bekerja.

Nilai kesejahteraan rumah tangga menjadi lebih berarti lagi bagi wanita pekerja yang menikah. Di sini perlu diperhitungkan nilai-nilai lain seperti misalnya bagaimana halnya dengan pengurusan anak-anaknya, karena terutama bagi anak-anak yang masih kecil memerlukan pengawasan/pemeli-

haraan yang khusus. Untuk ini diperlukan pengasuh/pembantu. Mempekerjakan pembantu/pengasuh berarti tambahan beban baik secara fisik maupun mental bagi rumah tangga, karena tanggung jawab yang diserahkan kepada orang lain selama ibu pergi ke tempat kerja. Selain itu perlu diperhitungkan bagaimana cara menukar waktu-waktu yang hilang seorang ibu bagi anak-anaknya misalnya dengan mengadakan rekreasi ke luar; mengadakan barang-barang yang diperlukan anak, mainan, atau makanan; atau dengan mengurangi waktu-waktu untuk tugas-tugas rumah tangga yang lain. Di samping itu peranan suami dalam memberikan pengertian yang luas terhadap isteri yang bekerja, cukup penting artinya bagi kesejahteraan rumah tangganya.

PENDIDIKAN WANITA DAN PEMBANGUNAN

Pada waktu-waktu yang lalu hingga sekarang, peranan kaum wanita dalam rumah tangga diakui sangat penting. Alam keluarga adalah tempat/pusat pendidikan untuk melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan budi pekerti (pembentukan watak individual) dan sebagai persiapan hidup kemasyarakatan. Untuk ini sebagai pengasuh dan pendidik anak-anak yang utama, maka kaum ibu sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat. Oleh karena itu pendidikan yang seluas-luasnya bagi wanita menurut bakat masing-masing, penting sekali artinya. Pada masa alam pendidikan sekarang ini, telah tersedia pula tempat-tempat pendidikan khusus semacam itu. Hal tersebut bisa terangkum dalam pendidikan "home economics" yaitu ilmu kesejahteraan keluarga yang meliputi pendidikan bidang inter dan antar keluarga, membimbing anak, makanan sehat, pakaian, perumahan, kesehatan, keuangan, tata laksana rumah tangga, keamanan lahir batin, perencanaan hidup sehat dan sebagainya.¹

Dalam hubungannya dengan ini, pendidikan ibu terhadap anak-anaknya akan mempengaruhi keadaan masyarakat sebagai lingkungan yang lebih luas lagi.

Di daerah pedesaan menurut penelitian Darjanto dan Astrid Susanto tentang Masalah-masalah Nasional Non-Politik, membuktikan bahwa kenaikan tingkat prosentase pendidikan anak ditentukan oleh jenis desa tempat tinggalnya, apakah desa tradisional, transisi atau modern, yaitu sejalan dengan tingkat modernisasi desa.²

1 Nani Soewondo, SH., *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Timun Mas, 1968, hal. 109

2 *Prisma*, No. 5, Oktober 1975, hal. 27

Dalam masa pembangunan sekarang ini, wanita di Indonesia cukup memberikan sumbangan yang menggembirakan. Walaupun jumlahnya secara perorangan belum seperti yang diharapkan, namun telah cukup banyak wanita yang menduduki jabatan-jabatan cukup penting dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada saat ini masalah yang sedang dicarikan pemecahannya adalah masalah peranan wanita pedesaan. Keadaan pendidikan wanita pedesaan pada umumnya rendah, sehingga mereka perlu ditingkatkan agar supaya dapat lebih berperanan baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Seperti diketahui bahwa jumlah anak di Indonesia yang berumur di bawah 15 tahun pada tahun 1976 adalah meliputi 54,4 juta atau 41% dari jumlah seluruh penduduk.¹ Sedangkan 44,4 juta atau sekitar lebih dari 81% nya tinggal di daerah pedesaan. Anak-anak inilah yang perlu mendapat perhatian dan perawatan dasar yang cukup baik dari orang tuanya terutama dari ibunya. Oleh karena itu peranan seorang ibu penting kiranya bagi perkembangan anak. Dengan menjadikan anak-anak yang cerdas dan pandai, maka dapat diharapkan masa depan negara dan bangsa yang cemerlang. Sehingga dapat dikatakan bahwa masa depan bangsa dan negara ditentukan oleh wanita.

Sehubungan dengan hal ini adanya pandangan bahwa pendidikan (formal) akan tidak mempunyai arti apabila seseorang wanita memasuki perkawinan dan tidak memanfaatkan pendidikan yang diperolehnya dengan bekerja, maka pandangan tersebut tidak beralasan lagi. tingkat pendidikan wanita yang juga berarti tingkat kecerdasan cara berpikir wanita itu, dapat dimanfaatkan untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Di pihak lain wanita yang rendah/kurang pendidikannya karena kurang/belum mempunyai kesempatan, misalnya oleh sebab alasan menikah, tidak berarti tertutupnya kesempatan bagi wanita tersebut untuk meningkatkan pendidikannya. Hal ini mengingat secara umum pendidikan adalah berlaku seumur hidup. Masalahnya adalah bisa bermacam-macam: (a) Dari pihak wanita itu sendiri apakah masih ada kemauan untuk meningkatkan pendidikan; (b) Apakah sudah cukup tersedia lembaga pendidikan formal baik umum maupun kejuruan tingkat dasar maupun menengah khusus untuk wanita yang telah menikah; (c) Adanya kesadaran pentingnya pendidikan wanita bagi rumah tangga maupun masyarakat dan perlunya penyuluhan tentang hal ini.

Segi lain dari masalah pendidikan wanita adalah dalam hubungannya dengan pelaksanaan keluarga berencana. Telah banyak penelitian yang dapat membuktikan hubungan pendidikan wanita dengan keluarga berencana. Makin tinggi pendidikan seorang wanita maka makin besar pengaruh dan partisipasi terhadap pelaksanaan keluarga berencana. Seperti diketahui peranan wanita terhadap pelaksanaan keluarga berencana di Indonesia ini sangat pen-

1 Biro Pusat Statistik, *Anak Indonesia Dalam Peta*, 1979

ting. Pertambahan penduduk dan jumlah penduduk yang sudah melebihi daya dukung wilayah terutama untuk Pulau Jawa mengharuskan pelaksanaan keluarga berencana ini. Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,3% tiap tahun pada tahun 1970-an dirasakan terlalu berat untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkannya. Salah satu usaha dalam pelaksanaan keluarga berencana yang paling efisien adalah dengan cara mengurangi fertilitas wanita pada usia subur. Dengan demikian dapat dibatasi/diatur jumlah anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan maka penyuluhan yang meluas di kalangan masyarakat terutama masyarakat pedesaan sangat diperlukan. Sekalipun sasaran utama adalah daerah-daerah padat penduduk di Indonesia namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya di daerah pedesaan yang padat penduduknya justru mengalami kesukaran. Sulitnya penerimaan konsep keluarga berencana antara lain disebabkan oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki sebagian besar penduduk (wanita) pedesaan. Hal ini dapat ditunjukkan dari data yang menyebutkan bahwa pada tahun 1976 di antara jumlah wanita yang menikah seluruh Indonesia sebesar 24.431.436 orang, maka baru 8.441.827 wanita untuk Pulau Jawa dan Bali (35,6%) menjadi akseptor keluarga berencana.¹ Untuk keperluan ini memang diperlukan baik sarana maupun prasarannya. Oleh sebab itu penyebab utama belum meluasnya pelaksanaan keluarga berencana di Indonesia adalah belum terjangkaunya seluruh wilayah yang padat penduduk oleh penyuluhan maupun pelayanan keluarga berencana. Sekalipun demikian faktor pendidikan seorang wanita sangat berpengaruh terhadap partisipasi pelaksanaan keluarga berencana. Hal ini disebabkan karena pada umumnya wanita dalam hal ini selain sebagai obyek sasaran keluarga berencana juga sebagai subyek pelaksanaannya.

1 Biro Pusat Statistik, *Peta Pembangunan Sosial Indonesia, 1930-1978*